

# Philosophical Groundwork for Multicultural Education

Erham Budi Wiranto<sup>1</sup> , Waston<sup>2</sup>, Sri Suwartini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Students of Islamic Education Doctoral Program, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup> Professor of Philosophy, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta

 [erhambudi@gmail.com](mailto:erhambudi@gmail.com), [was277@ums.ac.id](mailto:was277@ums.ac.id), [riri.srisuwartini@gmail.com](mailto:riri.srisuwartini@gmail.com)

## Abstract

*Multicultural Education lacks a solid foundation since it appears to be a reaction to socio-political developments rather than the outcome of philosophical principles from the Philosophy of Education. Multicultural Education lacks defined concepts, methods, and orientations due to its confusing ontological, epistemological, and axiological frameworks. This article is based on a review of the literature on Political and Social Philosophy, which was then reflected in the Philosophy of Education structure. The result is a Philosophical Foundation for Multicultural Education that is more oriented on the field of education while maintaining the basic notions of multiculturalism, which are founded on political and social sciences.*

**Keywords:** *Multiculturalism; Multicultural Education; Philosophy of Education*

## Abstrak

Pendidikan Multikultural belum memiliki landasan yang kokoh karena muncul lebih sebagai respon terhadap perubahan sosial-politik daripada hasil rekomendasi filosofis dari Filsafat Pendidikan. Tidak jelasnya bangunan ontologis, epistemologis, dan aksiologis membuat Pendidikan Multikultural tidak memiliki konsep, metode dan arah yang jelas. Paper ini merupakan hasil review terhadap literatur Filsafat Politik dan Filsafat Sosial, kemudian direfleksikan ke dalam bangunan Filsafat Pendidikan. Hasilnya berupa Landasan Filosofis Pendidikan Multikultural yang lebih jelas bagi dunia pendidikan namun tetap tersinari ide-ide utama Multikulturalisme yang menginduk pada ilmu Politik dan Sosial.

**Kata kunci:** Multikulturalisme; Pendidikan Multikultural; Filsafat Pendidikan

## 1. Pendahuluan

Upaya menemukan landasan Pendidikan Multikultural dilatarbelakangi fakta bahwa Pendidikan Multikultural sejauh ini masih sangat dipengaruhi perubahan sosial politik dan belum benar-benar berakar dari landasan filosofis. Padahal setiap ilmu perlu memiliki landasan filosofis. Menurut George R. Knight filsafat adalah kerangka dasar (*basic framework*) bagi pelaksanaan pendidikan[1]. Oleh karena itu landasan filosofis memiliki peran yang vital dalam bangunan pendidikan. Tanpa adanya filosofi yang jelas, maka pendidikan yang dijalankan tidak akan memiliki arah yang pasti. Pendidikan Multikultural hingga saat ini belum dibangun berdasarkan pijakan filosofis yang kokoh dan baru dijalankan sebagai respon perubahan sosio-politik dalam setengah abad terakhir.

Belum kokohnya pijakan filosofis Pendidikan Multikultural dapat dilihat, sebagai contoh, dalam konteks Indonesia. Pendidikan Multikultural yang dikembangkan di Indonesia banyak merujuk pada konsep *Multicultural Education* yang dibangun di Amerika dan diimplementasikan di beberapa negara Barat. Hampir semua kajian tentang Pendidikan Multikultural di Indonesia selalu merujuk karya yang diedit oleh James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks, *Multicultural Education, Issues and Perspectives*.

Buku tersebut seolah menjadi 'kitab suci' bagi Pendidikan Multikultural. Sementara itu, buku tersebut tidak memberikan pijakan filosofis Pendidikan Multikultural bahkan Banks & Banks juga mengakui bahwa Pendidikan Multikultural yang mereka wacanakan merupakan respon terhadap realitas yang berkembang dalam konteks Amerika.

Sejak bab pertama bukunya, Banks & Banks menegaskan hal tersebut. Menurut mereka, Pendidikan Multikultural muncul dari gejolak Gerakan Hak-hak Sipil (*civil rights movement*) yang terjadi di Amerika pada tahun 1960an. Gejolak ini merupakan perjuangan orang-orang Afrika-Amerika untuk menghapus diskriminasi dalam akomodasi publik, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Di ranah pendidikan, Gerakan Hak-hak Sipil tersebut menghendaki reformasi kurikulum pada sekolah dan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah agar kurikulum yang baru lebih mampu mengakomodasi pengalaman, sejarah, budaya, dan perspektif semua kelompok etnis yang ada di Amerika, dimulai dari kelompok Afro-American kemudian etnis lainnya. Reformasi ini juga menghendaki agar warga kulit berwarna dapat lebih dilibatkan sebagai pengajar dan tenaga kependidikan, serta menuntut adanya revisi terhadap buku-buku pelajaran yang dipandang bermasalah karena tidak mencerminkan realitas keragaman di Amerika [2, pp. 5–6].

Selain Amerika, multikulturalisme sebenarnya merupakan fenomena cukup umum di negeri Barat lainnya. Istilah multikulturalisme sejak dekade 1960-1970an juga telah menjadi wacana publik di negara-negara Eropa Barat, Australia, dan Kanada. Umumnya multikulturalisme dimaknai sebagai kebijakan pemerintah pusat dan otoritas lokal untuk mengelola multi-etnisitas baru yang tercipta akibat imigrasi orang-orang non-kulit putih sejak akhir perang Dunia II. Dalam konteks Eropa, multikultural juga didominasi dengan isu rasial. "Race" di Eropa, ibarat "*elephant in the room*" karena memenuhi ruang diskusi tentang multikulturalisme [3, p. 834]. Multikulturalisme dianggap muncul sebagai respon terhadap perubahan demografi Barat pasca Perang Dunia II, meski sebenarnya benih-benih tuntutan terhadap keragaman kultural sudah muncul sebelum terjadinya Perang Dunia II. Pada dekade 1930-1940, tuntutan kesetaraan manusia dan pengakuan keragaman kultural disuarakan menyusul adanya kesewenangan bahkan genosida terhadap Yahudi, kaum gay, dan kaum Gipsi oleh Nazisme Jerman. Muncul beberapa organisasi yang menyuarakan tuntutan pengakuan keragaman rasial, misalnya Anti Defamation League (ADL), the Urban League, the National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) [4]. Namun sebagai sebuah istilah, multikulturalisme saat itu memang belum muncul. Mewacananya multikulturalisme mengemuka seiring menguatnya demokrasi di berbagai negara dunia. Bahkan multikulturalisme dapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari demokrasi.

Hampir semua teori tentang multikulturalisme ini berpusat pada perkembangan di negara-negara demokrasi Barat. Meski tidak dapat diidentifikasi siapa atau teori mana yang bermaksud menerapkan multikulturalisme ke konteks non-Barat, namun teori-teori tentang multikulturalisme dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, setidaknya dalam bentuk slogan dan kutipan yang bernas, sehingga menyediakan kosakata dan perangkat konseptual untuk menjadi wacana global baru [5, p. 29].

Pendidikan Multikultural juga berkembang dengan dukungan gerakan hak-hak perempuan (*women's rights movements*) yang terjadi di Amerika selama dekade 1960 hingga 1970. Para feminis tampil untuk menyuarakan betapa diskriminasi dan seksisme yang melembaga di Amerika telah membatasi peluang perempuan dan berdampak buruk pada bangsa. Mereka menuntut agar lembaga-lembaga politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan menghapus diskriminasi jenis kelamin dan memberikan kesempatan bagi



perempuan untuk mengaktualisasikan bakat mereka dan mewujudkan ambisi mereka. Di ranah pendidikan, tuntutan dari gerakan perempuan ini juga jelas, mereka menolak buku teks dan kurikulum yang penyusunannya didominasi laki-laki. Mereka juga menuntut agar perempuan lebih dilibatkan sebagai administrator dan pimpinan di lembaga pendidikan yang saat itu hampir selalu dijabat laki-laki, sementara perempuan hanya membantu sebagai guru dan tenaga kependidikan yang tidak memiliki wewenang di ranah kebijakan.[2, p. 6] Tuntutan gerakan perempuan tersebut identik dengan gerakan hak-hak sipil yang diinisiasi kelompok etnis. Sehingga kepentingan kelompok etnis dan kelompok feminis merupakan unsur utama dalam pendidikan multikultural. Baru kemudian berkembang untuk mencakup kelompok orientasi seksual berbeda dan kelompok difabel (disabilitas).

Satu hal lagi yang menjadi pendorong Pendidikan Multikultural, sebagaimana diakui Banks & Banks, adalah budaya Amerika sendiri. Nilai-nilai budaya utama (*core culture*) Amerika menurut Banks & Banks adalah kesetaraan (*equity*), individualisme, dan ekspansionisme. Kesetaraan didasari oleh *Declaration of Independence* pada tahun 1776. Dalam deklarasi bersejarah tersebut disebutkan: “*all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.*” (semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkahi oleh Pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antaranya adalah hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan). Namun dalam konteks deklarasi tersebut, pengertian *all men* hanya mencakup pria kulit putih yang kaya (*White males who owned property*)[6]. Sedangkan pria kulit putih yang miskin, perempuan kulit putih, dan semua orang laki-laki dan perempuan kulit berwarna, tidak menjadi bagian dari pemilik hak kesetaraan. Inilah yang menjadi landasan reformasi etnis di Amerika, yaitu mereformasi makna *equality*.

Kedua, individualisme adalah nilai penting dalam budaya Amerika. Kesuksesan individu lebih bernilai daripada komitmen kepada keluarga. Kegagalan individu juga merupakan hukuman dari kemalasan dan tidak dimilikinya ambisi [2, p. 9]. Meskipun individualisme dalam masyarakat Barat selalu dikaitkan dengan etika Protestan [7], namun sebenarnya budaya Amerika sendiri terus memupuk individualisme melalui berbagai cerita fiksi dan cerita sejarah. Termasuk mengulang-ulang ketokohan George Washington, Thomas Jefferson, and Abraham Lincoln yang dipandang berhasil karena kekuatan karakter individunya. Dengan demikian, Pendidikan Multikultural bukan semata-mata perjuangan kelas etnis tertentu, namun yang lebih mengakar dari itu adalah perjuangan individu untuk memperoleh hak dan mengaktualisasikan dirinya.

Nilai budaya Amerika yang ketiga dan tidak kalah penting menurut Banks & Banks adalah ekspansionisme. Hasrat untuk menaklukkan alam serta minat pada materialisme dan konsumsi merupakan budaya Amerika, yang pada akhirnya menguatkan kepentingan menjadi bangsa superior. Hal ini menghadirkan, apa yang oleh Myrdal disebut sebagai *American Dilemma* [8]. Di satu sisi menempatkan kesetaraan sebagai idealisme namun pada sisi lain tetap memiliki hasrat menguasai pihak lain yang berbeda. Jika pendidikan multikultural masih dibayang-bayangi nilai ekspansionisme ini, maka misi untuk membangun kesetaraan tidak akan berjalan dengan tulus.[9]

Dengan demikian, Pendidikan Multikultural sebagai sebuah ide dan konsep, masih sangat bernuansa Amerika dan Barat secara umum, dan hanya merupakan reaksi terhadap perubahan sosio-politik, terutama perubahan demografi penduduk Barat yang semakin majemuk. Oleh karena itu landasan filosofisnya tidak dibangun dengan kuat. Hal



ini berdampak pada sifat pendidikan multikultural yang terkesan kondisional-situasional. Karakter ini membuat Pendidikan Multikultural hanya menjadi tren sesaat, bahkan dapat saja ditinggalkan ketika realitas sosial-politik berubah, misalnya apabila suatu negara berubah menjadi ultranasional dan chauvinistik. Hal ini pantas diantisipasi sebab penghargaan terhadap keragaman sebagai ciri utama Pendidikan Multikultural secara filosofis merupakan nilai yang eternal-perennial. Nilai yang sebetulnya tidak boleh hilang dari peradaban umat manusia.

Oleh karena itu pencarian landasan filosofis sangat diperlukan, demi memberi pijakan yang kokoh bagi Pendidikan Multikultural sehingga tidak mudah diubah bahkan ketika realitas sosial-politik berubah. Landasan filosofis juga semakin mendesak ketika Pendidikan Multikultural hendak diterapkan secara universal ke segala bangsa. Menemukan landasan filosofis Pendidikan Multikultural inilah yang tujuan utama dituliskan artikel ini.

## 2. Literatur Review

Ketidajelasan landasan filosofis Pendidikan Multikultural telah menjadi perhatian namun belum ada jawaban komprehensif yang terformulasi. Meski demikian beberapa literatur pantas disebut untuk menelusuri beberapa upaya mengarah pada penemuan landasan pendidikan multikultural. Upaya tersebut dapat dikelompokkan dalam dua cluster analisis. Pertama, literatur yang mengupas geneologi multikulturalisme. Bagian ini penting untuk lebih memahami aspek multikultural dari Pendidikan Multikultural. Urgensinya melebihi penjelasan terhadap filsafat pendidikan yang memang sudah banyak dibahas para filsuf. Sementara pembahasan tentang filsafat multikultural sendiri, meskipun sudah ada, namun wilayah terluasnya di ranah ilmu politik, sehingga, perlu menyaring beberapa analisis yang mengarah pada pendidikan. Bagian kedua fokus pada upaya menjelaskan filsafat Pendidikan Multikultural.

### 2.1. Geneologi Multikulturalisme

Multikulturalisme dapat dipandang sebagai sebuah cabang filsafat, yaitu cabang filsafat politik. Tepatnya sebagai cabang filsafat politik yang mengeksplorasi hubungan antara keragaman budaya, kebebasan dan kesejahteraan manusia, sembari menawarkan pembenaran untuk mengakomodasi klaim minoritas budaya dalam lembaga hukum dan politik, dan kebijakan publik. Multikulturalisme juga merupakan *umbrella term* yang menaungi sejumlah studi terkait seperti, politik identitas, politik pengakuan (*politics of recognition*), penentuan nasib kebangsaan sendiri (*national self-determination*) dan politik kewarganegaraan multinasional (*politics of multinational citizenship*), sekularisme dan keragaman agama (*secularism and religious diversity*), dan politik pribumi (*politics of indigeneity*)[10].

Salah satu filsuf teoretis multikulturalisme asal Kanada, yaitu Will Kymlicka, dikenal dengan akan pembelaannya terhadap hak-hak bangsa tak bernegara (*stateless nations*), masyarakat suku, hingga kelompok minoritas etnis dan minoritas agama. Menurut Kymlicka ada dua hal yang membuat multikulturalisme menjadi ide yang mengglobal. pertama, adanya difusi wacana politik (*political discourse*) multikulturalisme; dimana jejaring internasional yang meliputi pembuat kebijakan, LSM, dan para akademisi mendiskusikan seperangkat gagasan tentang pentingnya mengakomodasi keragaman. Kedua, adanya kodifikasi multikulturalisme menjadi norma-norma hukum internasional (*international legal norms*) yang melembaga dalam berbagai deklarasi tentang hak-hak

minoritas. Bahkan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) termasuk yang paling giat mendukung hal ini [11, p. 586].

Multikulturalisme asal Amerika dan Eropa yang kemudian mengglobal tersebut dikenal sebagai multikulturalisme liberal. Will Kymlicka tetap tokoh utamanya. Beberapa penanggap berikutnya juga cenderung sepakat pada jalan pikiran multikulturalisme liberal Kymlicka. Termasuk pula filsuf kontemporer Italia Roberto Esposito dan Alexej Ulbricht dari London dengan gagasan *multicultural immunization* [12]. Pendukung multikulturalisme liberal lainnya adalah Robert Maciel, ia percaya bahwa multikulturalisme liberal tetap relevan untuk realitas politik kontemporer. Baginya multikulturalisme liberal sebagaimana digagas Kymlicka adalah standar multikulturalisme, adapun kritik terhadapnya dianggap terlalu berlebihan [13]. Will Kymlicka pun sekali lagi menegaskan bahwa multikulturalisme liberal merupakan teori politik yang baik dalam mengatur hubungan negara dengan kelompok minoritas [14].

Sebagai bagian filsafat politik, multikulturalisme tetap tidak mudah diterapkan dalam berbagai konteks. Seringkali terjadi kebingungan dalam penerapannya. Misalnya dalam konteks Eropa yang memahami multikulturalisme sebagai *melting pot* dimana tuntutan untuk asimilasi sangat tinggi. Ada juga kebingungan di Australia tentang makna, fokus dan tujuan multikulturalisme itu sendiri [15]. Ketika Pendidikan Multikultural diterapkan di Asia, masalah serupa juga terjadi. Misalnya ketika dipraktikkan dalam dunia pendidikan muncul masalah *assimilation-centered curriculum*, dimana Pendidikan Multikultural dijalankan dengan prioritas pada upaya peleburan berbagai budaya untuk menjunjung satu budaya tertentu yang disepakati. Sebagai contoh, setiap orang sepakat menggunakan satu bahasa tertentu agar keragaman bahasa tidak menjadi hambatan. Model semacam ini lazim terjadi di negara yang relatif homogen. Misalnya dalam konteks Korea Selatan dimana realitas multikultural adalah situasi baru. Bahkan masyarakat multietnis di Korea hanya sekitar 2% populasi [16]. Dengan demikian, asimilasi yang sebenarnya justru mengarah kepada penyeragaman, tetap menjadi masalah serius dari praktik multikultural di beberapa wilayah.

Multikulturalism di Jepang juga bermasalah karena terlalu berorientasi kepada asimilasinya terhadap pergaulan global. Hal ini merupakan respon terhadap kompleksitas identitas yang terjadi di Jepang sebagai akibat laju modernitas. Multikulturalisme di Jepang diterapkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap program pendidikan pemahaman internasional dari UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) setelah Perang Dunia. Sejak tahun 2000an, pendidikan pemahaman internasional dibagi menjadi tiga subjek yang meliputi pendidikan pemahaman antarbudaya, pendidikan global/pendidikan kewarganegaraan global, dan pendidikan multikultural. Pembagian ini membuat Pendidikan Multikultural di Jepang lebih fokus pada upaya koeksistensi antar keragaman yang ada di dalam negeri. Terutama untuk mensikapi semakin banyaknya orang Jepang yang beridentitas kompleks (*pluri-identities*) [17]. Beberapa contoh kasus di atas menunjukkan paradoks, di satu sisi multikulturalisme mendorong akomodasi terhadap keragaman, namun pada sisi lain juga mendorong terjadinya asimilasi sehingga mengarah pada penyeragaman.

Masih tampaknya kebingungan dalam penerapan multikulturalisme sebenarnya bermuara pada belum mapannya landasan filosofis yang mendasari multikulturalisme. Sebagai turunan filsafat politik dan balutan liberalisme, multikulturalisme tampak belum mampu menjadi landasan Pendidikan Multikultural, apalagi jika diterapkan pada

komunitas beragama. Aroma liberalisme dalam multikulturalisme menghendaki pengakuan tanpa syarat terhadap segala realitas keragaman, bahkan termasuk realitas sosial yang dipandang patologis bagi beberapa tradisi lain. Sekedar contoh, LGBTQ (Lesbian Gay Bisexual Transgender dan Queer) diakui sebagai bagian dari keragaman dalam realitas sosial dan harus mendapatkan tempat semestinya di dunia pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Cris Mayo dalam buku *Multicultural Education*nya Banks & Banks [18]. Padahal bagi masyarakat beragama, realitas tersebut merupakan bagian dari patologi sosial. Namun multikulturalisme liberal tentu memiliki perspektif berbeda. Hal ini mendorong hadirnya pertanyaan, apakah multikulturalisme liberal dapat menjadi landasan pendidikan multikultural secara global.

## 2.2. Upaya Menagih Filsafat Pendidikan Multikultural

Jika multikulturalisme di Barat identik dengan multikulturalisme liberal, sedangkan Pendidikan Multikultural secara global sering merujuk pada model Pendidikan Multikultural Barat, maka Pendidikan Multikultural pada umumnya secara filosofis juga mengarah pada liberalisme. Logika ini tentu masih pantas dipertanyakan. Oleh karenanya penting untuk melacak bagaimana upaya menjelaskan landasan Pendidikan Multikultural pernah dilakukan melalui beberapa publikasi.

Landasan filosofis Pendidikan Multikultural pernah dipertanyakan beberapa peneliti, misalnya Richard N. Pratta. Pada awal dekade 1980an, melalui monografinya ia sudah mengekspresikan harapan akan hadirnya perspektif filsafat terhadap Pendidikan Multikultural [19]. Namun para filsuf pendidikan tidak kunjung memberikan jawaban konseptual.

Ferrara, Larke dan Lea memandang Pendidikan Multikultural sudah sebagai filsafat dalam arti sebagai *the way of thinking*. Namun yang mereka maksud sebagai cara berfikir tersebut sebenarnya merupakan refleksi dari teori Horace Kallen tentang *Cultural Pluralism* yang terdiri dari tiga prinsip dasar, yaitu (1) manusia tidak bisa memilih leluhurnya, artinya manusia terlahir sudah dengan kultural bawaan masing-masing, (2) budaya kelompok etnis memiliki hal positif untuk budaya Amerika, (3) gagasan tentang demokrasi dan kesetaraan membawa asumsi implisit bahwa meskipun ada perbedaan, manusia harus dipandang setara. Teori inilah yang menjadi ideologi Pendidikan Multikultural menurut Ferrara, Larke dan Lea [20].

Sudarsana dkk berupaya menjelaskan filsafat pendidikan berdasarkan nilai-nilai moral pada ranah ontologi, epistemologi, dan aksiologi [21]. Meski demikian, untuk memahami interkorelasi antara tiga aspek tersebut masih memerlukan upaya lebih lanjut. Demikian pula implementasinya di sekolah yang baru dijelaskan secara garis besar dengan keterangan yang terbatas.

Pendidikan Multikultural oleh Ainul Yaqin disebut sebagai filsafat pendidikan dan strategi pendidikan praktis. Pendidikan Multikultural diterapkan agar siswa lebih memahami pluralisme, humanisme, dan demokrasi. Dalam konteks Indonesia, menurutnya Pancasila merupakan landasan ideal bagi pendidikan multikultural [22]. Sehingga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga merupakan subyek yang efektif untuk penanaman wawasan dan sikap multikultural [23].

Dari beberapa upaya untuk mempertemukan filsafat dengan Pendidikan Multikultural, belum ditemukan formula yang rinci dan jelas tentang filsafat Pendidikan

Multikultural. Secara khusus belum ada jawaban eksplisit tentang posisi-posisi filosofis manakah yang menjadi landasan Pendidikan Multikultural.

### 3. Metode

Kajian ini merupakan penelitian filsafat. Data dikumpulkan dari literatur filsafat ilmu sosial (*Social Sciences*) dan bidang pendidikan. Dalam menemukan landasan filosofis Pendidikan Multikultural, kajian ini meminjam perspektif Filsafat Ilmu Sosial yang kemudian direfleksikan ke dalam filsafat pendidikan. Cara yang ditempuh adalah dengan mengambil salah satu rumusan tentang Multikulturalisme dari Filsafat Ilmu Sosial. Rumusan tersebut kemudian dikontekskan dengan bidang pendidikan sehingga menjadi Filsafat Pendidikan.

Alasan penerapan Filsafat Ilmu Sosial untuk Pendidikan Multikultural adalah karena sifat Pendidikan Multikultural sendiri yang lebih menitikberatkan pada isu-isu relasi sosial daripada pendidikan secara individu. Pendidikan Multikultural membicarakan bagaimana hidup baik dengan orang lain, bukan bagaimana menguasai software desain grafis komputer dalam seminggu. Oleh karena itu, mempertemukan filsafat ilmu sosial dengan filsafat pendidikan adalah sebuah keniscayaan bagi pendidikan multikultural.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Multikulturalisme dalam Filsafat Ilmu Sosial

Salah satu kajian cukup komprehensif dalam mencari landasan filsafat bagi multikulturalisme adalah karya Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: Multicultural Perspective*. Karya ini mengarahkan kepada beberapa alternatif filosofis yang dapat dipandang sebagai landasan multikulturalisme. Upaya Brian Fay menghasilkan 12 thesis (pernyataan) yang menjadi postulat bagi *multicultural philosophy of social science* yang ia bangun. 12 (duabelas) Tesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Waspada terhadap adanya dikotomi, hindari dualisme jahat, berpikirlah secara dialektis.
2. Jangan menganggap orang lain sebagai Yang Lain. Perhatikan kesamaan dan perbedaan sebagai istilah-istilah relatif yang saling berpresuposisi.
3. Transedensikan kesalahan memilih antara universalisme dan partikularisme (kekhususan), asimilasi dan pemisahan. Alih-alih berusaha mengatasi perbedaan dan menguatkannya, berinteraksilah dengan mereka yang berbeda dengan cara memanfaatkan perbedaan, dengan pandangan diarahkan pada pembelajaran dan perkembangan yang terus menerus saling menguntungkan.
4. Berpikirlah secara proses, bukan secara substantif (artinya berpikirlah dalam pengertian kata kerja, bukan kata benda). Masukkan waktu sebagai elemen pokok pada seluruh entitas sosial. Amati terjadinya pergeseran, transformasi, evolusi, perubahan – dimana-mana.
5. Doronglah keagenan pada apapun yang dipelajari
6. Kenalilah agen-agen hanya karena agen-agen itu ditempatkan pada situasi yang menguatkan sekaligus membatasi.
7. Harapkan lebih banyak pencerahan dari tindakan manusia atau produk apapun yang berusaha Anda pahami.

8. Jangan pandang masyarakat sebagai monad-monad integral yang terpisah satu sama lain, atau orang lain yang menjadi anggota kultur atau kelompok tertentu. berikan perhatian pada wilayah-wilayah perbatasan dimana berbagai macam orang berhubungan satu sama lain dan berubah selama proses. Fokuskan pada hubungan bersifat cangkakan atau hibrid. Berikan perhatian khusus pada tekanan dari internal, hambatan, usaha keras, kegagalan pembenahan di daerah inti dan pengendalian pada bagian tepi. Dan perhatikanlah ambiguitas, ambivalensi, kontradiksi dimana-mana.
9. Bersyukurlah terhadap peran di masa lalu yang menguatkan Anda. Akan tetapi ketahuilah cara-cara yang Anda lakukan di masa lalu.
10. Perhatikan rekatan historis dan kultural pengetahuan ilmu sosial, perkirakan bahwa apa yang kita ketahui saat ini akan ketinggalan zaman dengan perubahan-perubahan konseptual maupun perubahan-perubahan lainnya di dalam kehidupan kita maupun kehidupan mereka yang kita pelajari.
11. Jangan bersembunyi di balik topeng ilusi netralitas dalam mengamati diri sendiri atau orang lain yang anda tuju. Hargailah perangkat intelektual yang anda bawa dalam mengkaji orang lain; hati-hatilah akan terjadinya perubahan dalam cara anda berinteraksi dengan mereka; dan lakukan penilaian atas apa yang dikerjakan orang lain secara eksplisit. Akan tetapi, usahakan untuk melakukannya dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat memberikan respon terhadap bukti yang dapat anda tentukan sedapat mungkin dan dapat diterangkan kepada mereka yang menuliskannya. Berusahalah bersikap kritis terhadap orang lain.
12. Penerimaan dan penyambutan tidaklah cukup. Ikatlah mereka.

Tesis *multicultural philosophy of social science* terkesan cukup sulit dipahami, terutama bagi siapapun yang belum membaca buku Brian Fay secara utuh. Meringkasnya menjadi poin-poin yang distingtif, dengan cara mengidentifikasi kata-kata kunci, sangat diperlukan untuk mencegah pemahaman yang *overlapping* terhadap 12 tesis tersebut.

Tesis pertama dapat diringkas menjadi “berfikir dialektis”. Ini sudah cukup untuk mewadahi sikap kewaspadaan terhadap berbagai dikotomi dan dualisme yang ditemui dalam berbagai tradisi berfikir. Tesis kedua dapat disederhanakan “Yang Lain bukan berbeda secara mutlak”. Ketiga, fokus tesis yang hendak disampaikan adalah “Berinteraksi dengan yang perbedaan untuk mengambil pembelajaran”. Hal ini untuk menghindari kecenderungan manusia yang memaksakan diri agar bergabung pada yang umum (melakukan asimilasi) atau kecendrungan sebaliknya yang menolak asimilasi dan justru bersikukuh menegaskan kebedaannya (separatisme). Tesis keempat, Brian Fay ingin menegaskan bahwa manusia adalah *human being*, bukan *human* saja. *Being* adalah kata kerja yang dibendakan (*gerund*), sehingga hakikat manusia adalah kerja. Oleh karena itu menjadi penting untuk “berfokus pada proses”. Kelima, maksud Brian Fay dengan konsep agen adalah fakta bahwa manusia bukan pembentuk budaya saja dan sekaligus bukan obyek yang dibentuk oleh budaya, manusia bersifat ‘terus menyesuaikan’ dengan realitas kulturalnya. Keenam, masih terkait dengan agen, manusia lain dengan budaya yang melekat padanya, sebenarnya memiliki potensi sebagai pendukung sekaligus penghambat. Ketujuh, hasil tindakan dan produk manusia, atau disebut pula sebagai budaya, tidak pernah dimaknai secara kaku, namun selalu tergantung pada penafsiran dan signifikansinya. Oleh karena itu makna dalam setiap unsur budaya sebenarnya terus berubah. Kedelapan, Brian Fay ingin menegaskan bahwa dalam masyarakat homogen

sekalipun, di dalamnya pasti terdapat keragaman. Dapat dikatakan, bahwa selalu ada anomali dalam heterogenitas, dan hal tersebut membuktikan adanya keragaman meski dalam prosentase yang kecil. Kesembilan, mempertimbangkan nomologisme dan historisisme, Fay menekankan pentingnya menyadari pengaruh masa lalu terhadap persepsi realitas di masa kini, namun tetap diperlukan upaya penolakan agar tidak terjebak oleh masa lalu dalam menghadapi masa kini. Kesepeuluh, mengingatkan tentang ketidakabadian formula apapun, baik teori, rumus, dan upaya generalisasi lainnya, yang bisa jadi akan ditinggalkan di masa depan. Kesebelas, Fay mempermasalahkan netralitas. Menurutnya, tidak perlu menjadi netral untuk dapat menghargai keragaman. Sebab yang dibutuhkan adalah obyektifitas, yaitu sikap terbuka apa adanya. Terakhir, dalam konteks multikultural, adanya apresiasi, penerimaan, penghormatan dari satu pihak ke pihak lain bukanlah tujuan akhir. Hasil akhirnya harus lebih dari itu, yakni relasi yang saling menumbuhkan.

Dengan demikian, berikut ini adalah 12 tesis *multicultural philosophy* yang penulis adaptasi dari gagasan Brian Fay:

1. Berfikir dialektis
2. Yang Lain bukan berbeda secara mutlak.
3. Berinteraksi dengan perbedaan untuk mengambil pembelajaran.
4. Berfokus pada proses.
5. Terus menyesuaikan diri dengan realitas.
6. Sadar potensi dukungan dan hambatan dari Yang Lain.
7. Makna dalam setiap unsur budaya terus berubah
8. Selalu ada anomali dalam homogenitas.
9. Hormati tradisi, harga kebaruan
10. Kemajuan hari ini kelak akan menjadi usang
11. Obyektifitas (apa adanya) lebih penting dari netralitas
12. Penghormatan saja tidak cukup, harus saling menumbuhkan.

Berikutnya, 12 Tesis Filsafat Multikultural direfleksikan ke dalam bidang Pendidikan untuk membangun beberapa doktrin filsafat pendidikan multikultural.

#### **4.2. Kontekstualisasi Filsafat Multikultural ke Dalam Filsafat Pendidikan**

Tesis pertama Filsafat Multikultural yaitu Berfikir dialektis (*Dialectical thinking*), dalam dunia pendidikan dikaitkan dengan *critical thinking* (berfikir kritis). *Dialectical thinking* merupakan langkah pendahuluan sebelum terjadinya *critical thinking*. Berfikir dialektis mengacu pada kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai perspektif dan untuk sampai pada rekonsiliasi yang paling ringkas dan masuk akal dari informasi dan fenomena yang tampaknya bertentangan. Berpikir dialektis adalah bentuk penalaran analitis untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran selama ada pertanyaan dan konflik [24]. Pendidikan dengan *dialectical thinking* dapat dipraktikkan misalnya dengan mengajarkan kepada siswa bahwa pandangan yang tampaknya berlawanan tentang realitas dapat didamaikan menjadi makna yang lebih masuk akal daripada pembelaan terhadap salah satu posisi. Dengan demikian, poin pertama dalam Filsafat Pendidikan Multikultural adalah bahwa pendidikan harus dialektis, mampu mengkompromikan dua hal yang tampaknya bertentangan.

Filsafat multikultural mengajukan tesis kedua bahwa “Yang Lain bukan berbeda secara mutlak”, sebuah konsep anti-ekstrimisme, non-absolutisme, dan anti-realisme. Paham filsafat Realisme memandang nilai bersifat absolut dan abadi berdasarkan hukum alam. Sedangkan pendidikan multikultural tidak bertujuan mengabsolutkan sesuatu. Sebab sesuatu yang absolut berarti tidak memiliki pintu kritik maupun eksperimentasi. Hal ini tentu berseberangan dengan prinsip berpikir kritis dialektis sebagaimana pada tesis pertama tadi. Dengan demikian, tesis kedua ini dalam konteks filsafat pendidikan dapat diformulasikan bahwa pendidikan multikultural bukan upaya memutlakkan sesuatu.

Ketiga, fokus multikulturalisme adalah interaksi kepada perbedaan. Perbedaan bukan untuk dihindari atau diasingkan, tapi justru harus didekati. Dengan mendekati perbedaan akan dihasilkan pengalaman baru yang dapat menjadi pelajaran. Dalam dunia Pendidikan praktik penyeragaman sering dilakukan dalam rangka kesetaraan. Namun beberapa perbedaan kultural tetap harus diapresiasi. Pelarangan jilbab pada sekolah-sekolah di Perancis dan kasus pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswa non-muslim di Indonesia sama-sama merupakan contoh bentuk penyeragaman yang mengalienkan perbedaan. Pendidikan Multikultural menolak hal tersebut dan lebih mengutamakan interaksi positif terhadap perbedaan sehingga dapat ditemukan pelajaran dan hikmah dari interaksi tersebut.

Keempat, pendidikan adalah pengalaman yang terus berproses. Tidak ada tujuan akhir dari pendidikan selain proses mengalami. Sehingga orientasi utamanya bukan pada hasil/output. Orientasi hasil juga berpotensi menuju absolutisme. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengutamakan kualitas proses daripada capaian hasil akhir. Dalam interaksi kultural di dunia pendidikan, proses interaksi perlu diprioritaskan agar terbangun relasi yang tulus, bukan sekedar penghargaan yang semu meski hal itu tampak indah dari luarnya.

Kelima, terus menyesuaikan diri dengan realitas juga merupakan tesis penting dalam Filsafat Multikultural. Dalam konteks pendidikan tesis ini dapat dimaknai sebagai seruan bahwa pendidikan harus responsif terhadap perubahan. Realitas sosial tidak pernah stagnan, hal ini juga sangat dirasakan oleh lembaga pendidikan. Ketika demografi masyarakat berubah, misalnya semakin banyak pendatang dan semakin beragam corak budaya para pendatang, maka komposisi peserta didik juga terjadi perubahan yang semakin kompleks. Pendidikan harus siap menghadapi setiap realitas yang berubah.

Keenam, sadar potensi dukungan dan hambatan dari Yang Lain. Tesis filsafat multikultural ini dimaksudkan untuk membiasakan kesiapan dalam menghadapi potensi menyenangkan dan tidak menyenangkan dari setiap realitas kultural. Dalam Pendidikan Multikultural dimana keragaman adalah realitas keseharian, harus pula ditegaskan pentingnya kesiapan menghadapi kejutan kultural yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Hal tersebut dapat saja bersifat negatif dan dianggap menghambat proses pembelajaran, namun kejutan kultural terkadang juga bernilai positif bagi proses pembelajaran.

Ketujuh, dalam filsafat multikultural terdapat kesadaran akan relativitas makna. Budaya berisi ekspresi dan simbol-simbol dengan makna khusus. Akan tetapi makna dari suatu ekspresi sebetulnya tidak bersifat konstan, justru sangat rentan untuk berubah. Dalam pendidikan multikultural juga perlu adanya kesadaran akan relativitas makna. Setiap peserta didik, dapat saja memegang tradisinya secara teguh, namun seiring berjalan waktu cara mereka menafsirkan tradisinya sendiri juga dapat berubah. Bahkan

seandainya beberapa peserta didik dengan akar budaya yang sama, belum tentu mereka benar-benar sama dalam memaknai budayanya. Hal ini terkait dengan tesis filsafat multikultural yang berikutnya, bahwa selalu ada anomali dalam keseragaman.

**Tabel 1.** Kontekstualisasi Filsafat Multikultural menjadi Doktrin Filsafat Pendidikan Multikultural

	<b>Tesis Filsafat Multikultural</b>	<b>Doktrin Filsafat Pendidikan Multikultural</b>
1	Berfikir dialektis	Pendidikan Multikultural harus dialektis, mampu mengkompromikan dua hal yang tampaknya bertentangan.
2	Yang Lain bukan berbeda secara mutlak.	Pendidikan bukan upaya memutlakkan sesuatu.
3	Berinteraksi dengan perbedaan untuk mengambil pembelajaran.	Pendidikan perlu mengakrabi perbedaan sebagai sumber ilmu dan hikmah.
4	Berfokus pada proses.	Pendidikan mengutamakan proses daripada hasil
5	Terus menyesuaikan diri dengan realitas.	Pendidikan harus responsif terhadap perubahan
6	Sadar potensi dukungan dan hambatan dari Yang Lain.	Pendidikan harus siap dengan kejutan kultural baik yang mendukung maupun menghambat proses pendidikan.
7	Makna dalam setiap unsur budaya terus berubah.	Pendidikan mengakui adanya pemaknaan yang berubah-ubah terhadap budaya.
8	Selalu ada anomali dalam homogenitas.	Pendidikan memaklumi munculnya keluarbiasaan yang terjadi dalam kelompok yang homogen/seragam
9	Hormati tradisi, harga kebaruan	Pendidikan menghormati keunikan budaya dan upaya pelestariannya, namun menghargai pula pembaruan yang terjadi padanya.
10	Kemajuan hari ini kelak akan menjadi usang.	Pendidikan menghindari arogansi pembaruan terhadap pelestarian tradisi.
11	Obyektifitas (apa adanya) lebih penting dari netralitas.	Pendidikan mendorong individu menjadi diri sendiri dan tidak perlu menjadi ambigu untuk dapat bersikap netral.
12	Penghormatan saja tidak cukup, harus saling menumbuhkan.	Pendidikan Multikultural mendorong setiap individu saling mendukung untuk mengoptimalkan potensinya, bukan sekedar saling menghormati.

Seberapapun pekatnya homogenitas dalam sebuah kelompok, di dalamnya pasti terdapat perbedaan, meski dalam bentuk paling halus sekalipun. Filsafat Multikultural tidak mengakui adanya keseragaman mutlak. Dalam Pendidikan Multikultural perlu adanya kesadaran bahwa keunikan, ketidakbiasaan, sesuatu yang *out of box*, pasti sangat mungkin terjadi meski dalam kelas atau kelompok peserta didik yang homogen. Ketika anomali semacam itu muncul, maka apresiasi terhadap perbedaan tetap harus diberikan, dan tidak perlu ada upaya pemaksaan untuk keseragaman.

Kesembilan, secepat apapun budaya mengalami perubahan, Pendidikan tetap harus menghormati keunikan budaya dan upaya pelestariannya. Seiring kemajuan zaman, pendidikan sering berambisi mengajak peserta didik untuk bergegas mengikuti zaman dan mau berubah, bahkan bila perlu dilakukan dengan meninggalkan konservatisme tradisi/budaya. Namun Pendidikan Multikultural harus mampu menghargai upaya pelestarian tradisi atau budaya meskipun ia telah ketinggalan zaman sekalipun.

Kesepuluh, terkait dengan pembahasan kesembilan, sikap terlalu percaya pada perkembangan terkini hendaknya juga diiringi dengan kesadaran bahwa apa yang dianggap maju pada hari ini akan dianggap terbelakang pula di masa depan nanti.

Kesadaran ini akan turut meredam arogansi kebaruan terhadap tradisi. Pendidikan Multikultural memandang tradisi sebagai kekayaan yang pantas dilestarikan sebab ia, pada zamannya dahulu, bisa jadi merupakan pencapaian paling maju bagi masyarakat saat itu.

Kesebelas, filsafat multikultural menghendaki sikap tanpa topeng, sehingga lebih mendorong individu menjadi dirinya sendiri daripada menjadi orang yang netral atau tidak jelas posisinya. Pendidikan Multikultural memastikan bahwa untuk menjadi pribadi yang toleran dan akomodatif tidak perlu mengorbankan identitas dirinya sendiri. Individu tetap berhak menjadi berbeda dan pada saat yang sama menghargai perbedaan yang melekat pada diri orang lain.

Terakhir, tujuan filsafat multikultural bukan sekedar untuk mengakomodasi eksistensi pihak lain, namun lebih dari itu yakni terjadinya interaksi yang saling menumbuhkan. Adanya penerimaan, sambutan hangat, penghormatan dari satu terhadap yang lain bukanlah akhir dari filsafat multikultural. Pendidikan Multikultural mendorong terjadinya interaksi saling menumbuhkan diantara individu bukan sekedar sikap saling menerima. Sikap akomodatif hanyalah pintu menuju tujuan yang sesungguhnya, yaitu membuat semua pihak dapat berkembang mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

#### 4.3. Doktrin Filsafat Pendidikan Multikultural

Duabelas poin sebagaimana dijelaskan di atas merupakan upaya merumuskan beberapa premis filosofis terkait Pendidikan Multikultural. Mengingat penting dan mendasarnya beberapa premis tersebut, penulis mengistilahkannya sebagai Doktrin Filsafat Pendidikan Multikultural. Jika ingin diletakkan sebagai landasan filosofis Pendidikan Multikultural, maka 12 Doktrin tersebut perlu diklasifikasikan dalam tiga posisi filosofis penting yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menjawab tentang apa hakikat Pendidikan Multikultural, epistemologi menjelaskan bagaimana Pendidikan Multikultural dijalankan, sedangkan aksiologi menjawab apa tujuan dari Pendidikan Multikultural.

**Tabel 2.** Pemetaan Dimensi Filsafat Pendidikan Multikultural

	<b>Doktrin Filsafat Pendidikan Multikultural</b>	<b>Kecenderungan pada Dimesi Filsafat</b>
1	Pendidikan Multikultural harus dialektis, mampu mengkompromikan dua hal yang tampaknya bertentangan.	Epistemologis
2	Pendidikan bukan upaya memutlakkan sesuatu.	Ontologis
3	Pendidikan perlu mengakrabi perbedaan sebagai sumber ilmu dan hikmah.	Epistemologis
4	Pendidikan mengutamakan proses daripada hasil	Ontologis
5	Pendidikan harus responsif terhadap perubahan	Epsitemologis
6	Pendidikan harus siap dengan kejutan kultural baik yang mendukung maupun menghambat proses pendidikan.	Epsitemologis
7	Pendidikan mengakui adanya pemaknaan yang berubah-ubah terhadap budaya.	Ontologis
8	Pendidikan memaklumi munculnya keluarbiasaan yang terjadi dalam kelompok	Ontologis

yang homogen/seragam		
9	Pendidikan menghormati keunikan budaya dan upaya pelestariannya, namun menghargai pula pembaruan yang terjadi padanya.	Epistemologis
10	Pendidikan menghindari arogansi pembaruan terhadap pelestarian tradisi.	Epistemologis
11	Pendidikan mendorong individu menjadi diri sendiri dan tidak perlu menjadi ambigu untuk dapat bersikap netral.	Aksiologis
12	Pendidikan Multikultural mendorong setiap individu saling mendukung untuk mengoptimalkan potensinya, bukan sekedar saling menghormati.	Aksiologis

Pemetaan Doktrin Filsafat Multikultural ke dalam dimensi-dimensi filsafat sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2 masih bersifat pemetaan kecenderungan berdasarkan interpretasi penulis. Upaya ini hanyalah inisiasi dan masih perlu diulas kembali dengan deskripsi yang lebih berbobot. Namun sebagai langkah awal guna memancing diskusi lebih lanjut, upaya tersebut sementara dirasa cukup.

## 5. Kesimpulan

Dengan merefleksikan gagasan dari Filsafat Multikultural ke dalam Filsafat Pendidikan, kajian ini menemukan bahwa landasan filosofis pendidikan multikultural dapat dibangun secara lebih eksplisit. Kajian ini merekomendasikan 12 doktrin Filsafat Pendidikan Multikultural. Kemudian 12 doktrin tersebut dipetakan untuk dapat menyusun konstruksi filosofis dengan tiga dimensi yang dapat menjadi Landasan Filsafat Pendidikan Multikultural. *Pertama*, secara ontologis Pendidikan Multikultural bukan upaya memutlakkan sesuatu, namun justru corak pendidikan yang mengutamakan proses, mengakui relativitas budaya, dan memaklumi munculnya anomali. *Kedua*, secara epistemologis Pendidikan Multikultural bercorak pikir dialektis, mengakrabi perbedaan sebagai sumber ilmu dan hikmah, responsif terhadap perubahan, selalu siap dengan setiap kejutan kultural, menghormati keunikan dan kelestarian budaya sekaligus menghargai pula pembaruan, namun menghindari arogansi pembaruan terhadap pelestarian tradisi. *Ketiga*, secara aksiologis, Pendidikan Multikultural bertujuan mendorong setiap individu menjadi diri sendiri secara apa adanya dan mendorong semua pihak untuk saling mengoptimalkan potensi sesamanya, bukan sekedar saling menghormati.

## Referensi

- [1] G. Knight, "Philosophy and Education: An Introduction in Christian Perspective, 4th Edition," *Education and Psychology*, Jan. 2006, [Online]. Available: <https://digitalcommons.andrews.edu/education-and-psychology-books/1>
- [2] J. A. Banks and C. A. M. Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, 7th ed. USA: Wiley, 2010.
- [3] J. Suissa, "Multiculturalism and Diversity," in *International Handbook of Philosophy of Education*, P. Smeyers, Ed. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-72761-5>
- [4] J. L. Lei and C. A. Grant, Eds., *Multicultural Education in the United States; A case of Paradoxical Equality on A Global Construction of Multicultural Education*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001.

- [5] W. Kymlicka and B. He, *Multiculturalism in Asia*. Oxford University Press, 2005. doi: 10.1093/0199277621.001.0001.
- [6] E. Foner, "The Supreme Court and the History of Reconstruction -- and Vice-Versa," *Columbia Law Review*, pp. 1585–1606, Nov. 2012.
- [7] M. Weber and S. Kalberg, *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*. Routledge, 2013.
- [8] G. Myrdal, "An American Dilemma," *Race*, vol. 4, no. 1, pp. 3–11, Apr. 1962, doi: 10.1177/030639686200400101.
- [9] S. Suwartini and E. B. Wiranto, "Konseling Multikultural Sebagai Pendekatan Studi Terorisme," *Jurnal Dakwah*, vol. 22, no. 1, Art. no. 1, Aug. 2021, doi: 10.14421/JD.22.1.21.5.
- [10] M. Murphy, "Multiculturalism," *Oxford Bibliographies*, Feb. 22, 2018. <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0361.xml> (accessed Aug. 18, 2021).
- [11] W. Kymlicka, "Multicultural Odysseys," *Ethnopolitics*, vol. 6, no. 4, pp. 585–597, Nov. 2007, doi: 10.1080/17449050701659789.
- [12] R. Williams, "Review: Alexej Ulbricht, *Multicultural Immunisation: Liberalism and Esposito*," *Theory, Culture & Society*, vol. 34, no. 7–8, pp. 265–268, Dec. 2017, doi: 10.1177/0263276417736366.
- [13] R. Maciel, "The Future of Liberal Multiculturalism," *Political Studies Review*, vol. 12, no. 3, pp. 383–394, Sep. 2014, doi: 10.1111/1478-9302.12018.
- [14] W. Kymlicka, "Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State–Minority Relations," *Political Theory*, vol. 46, no. 1, pp. 81–91, Feb. 2018, doi: 10.1177/0090591717696021.
- [15] J. Pakulski, "Confusions about multiculturalism," *Journal of Sociology*, vol. 50, no. 1, pp. 23–36, Mar. 2014, doi: 10.1177/1440783314522190.
- [16] B. L. Kim, "Multicultural Education in Asia and the Role of Language Teaching: Focusing on South Korea," *Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics*, vol. 24, no. 1, pp. 67–83, 2020, doi: doi.org/10.25256/PAAL.24.1.4.
- [17] N. Ikeno, "The Issues and Problems of Multi-Cultural Education in Japan: Focus on Formation of Pluri-Identities," *Theory and Research for Developing Learning Systems*, vol. 3, pp. 27–41, 2017.
- [18] C. Mayo, "Queer Lessons: Sexual and Gender Minorities in Multicultural Education," in *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, 7th ed., J. A. Banks and C. A. M. Banks, Eds. USA: Wiley, 2010.
- [19] R. N. Pratta, "Multicultural Education: A Need for Philosophical Perspective. World Education Monograph Series, Number Three." Connecticut Univ., Storrs. Thut (I.N.) World Education Center., 1981. Accessed: Aug. 05, 2021. [Online]. Available: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED216961.pdf>
- [20] M. M. Ferrara, P. J. Larke, and J. Lea, "A Case Study of Seven Preservice Teachers' Emerging Philosophy about Multicultural Education," *National Forum of Multicultural Issues Journal*, vol. 7, no. 1, p. 23, 2010.
- [21] I. K. Sudarsana *et al.*, "Implementation Of Value And Moral Philosophy In Multicultural Education In School," *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, vol. 12, pp. 2948–2956, Jun. 2020, doi: 10.5373/JARDCS/V12I6/S20201258.
- [22] M. A. Yaqin, "Multicultural education development: Phylosophy and implementation," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, p. 327, Dec. 2013, doi: 10.14421/jpi.2013.22.327-353.
- [23] B. Sumardjoko, H. J. Prayitno, and A. Prasetyo, "Pembelajaran PPKn sebagai Perekat Sosial Masyarakat Multikultural dan Edukasi Harmoni Sosial," *Proceeding of The URECOL*, pp. 355–356, Oct. 2019.
- [24] A. V. Manzo and And Others, *Dialectical Thinking: A Generative Approach to Critical/Creative Thinking*. 1992.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

